

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2017, tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015, Serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2021 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Laporan Realisasi Anggaran** memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, Realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 5.859.395.380,00 atau 84,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 6.940.990.529,00. Defisit-LRA sebesar Rp. 5.859.395.380,00.
2. **Laporan Operasional** memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari

pendapatan-LO, beban, transfer. Realisasi pendapatan LO pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada. Realisasi Beban pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 5.967.608.713,00. Defisit-LO sebesar Rp. 5.967.608.713,00.

3. **Laporan Perubahan Ekuitas** menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Ekuitas Akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.844.404.473,07 yang terdiri dari selisih antara Ekuitas Awal sebesar Rp. 2.952.617.805,41, defisit-LO sebesar (Rp. 5.967.608.713,00), Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 0,66 dan Kewajiban untuk di Konsolidasikan sebesar Rp. 5.859.395.380,00.
4. **Neraca** menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset lancar adalah sebesar Rp. 19.538.690,00, aset tetap sebesar Rp. 2.735.006.668,07, aset lainnya sebesar Rp. 89.0859.115 dan Ekuitas sebesar Rp. 2.844.404.473,07.
5. **Catatan atas Laporan Keuangan** dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, 11 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Tengah,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP. 19690806 198911 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan		v
Pernyataan Tanggung jawab		1
Ringkasan		2
Laporan Realisasi Anggaran		2
Laporan Operasional (LO)		3
Laporan Perubahan Ekuitas		3
Neraca		3
Catatan atas Laporan Keuangan		4
Bab I	Pendahuluan	8
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 8
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 9
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 10
Bab II	Pencapaian Target Kinerja APBD	12
	2.1	Pencapaian Target Kinerja APBD 12
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	15
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 15
	3.2	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 15
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	16
	4.1	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 16
	4.2	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 19
	4.3	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP 19
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	20
	5.1	Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 20
		5.1.1 Pendapatan 20
		5.1.2 Belanja 20
	5.2	Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO) 24
		5.2.1Pendapatan-LO 24
		5.2.2 Beban 24
	5.3	Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 33
		5.3.1 Ekuitas Awal 33
		5.3.2 Surplus/Defisit – LO 33
		5.2.3 Koreksi Ekuitas Lainnya 33
		5.3.4 Kewajiban Untuk di Konsolidasikan 33
		5.3.5 Ekuitas Akhir 33

5.4	Penjelasan Akun-akun Neraca	34
	5.4.1 Aset Lancar	34
	5.4.2 Aset Tetap	34
	5.4.3 Aset Lainnya	40
	5.4.4 Aset Extracomptable	40
	5.4.5 Ekuitas	41

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan		
Pendapatan	V.1.1	Pendapatan
Belanja	V.1.2	Belanja
	A	Belanja Pegawai
	B	Belanja Barang dan Jasa
	C	Belanja Modal
	D	Belanja Hibah
Pendapatan-LO	V.2.1	Pendapatan –LO
Beban	V.2.2	Beban
	A	Beban Pegawai
	B	Beban Barang dan Jasa
Ekuitas	V.3.1	Ekuitas Awal
Aset	V.4.1	Aset lancar
	A	Kas di Bendahara Pengeluaran
	B	Persediaan
	V.4.2	Aset Tetap
	A	Tanah
	B	Peralatan dan Mesin
	C	Gedung dan Bangunan
	D	Irigasi dan Instalansi
	E	Aset Tetap Lainnya
	F	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	G	Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya	V.4.3	Aset Lainnya
Aset Extracomprable	V.4.4	Aset Extracomptable

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 11 Februari 2022

**Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Tengah,**



**Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP. 19690806 198911 1 002**

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan selama periode (1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021).

Realisasi Belanja 1 Januari 2021s/d 31 Desember 2021 Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 5.859.395.380,00 atau 84,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 6.940.990.529,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	6.940.990.529,00	5.859.395.380,00	6.325.147.769,00	5.660.002.681,00

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa selama satu periode pelaporan.

Realisasi pendapatan-LO pada periode 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00 dan Realisasi Beban adalah sebesar Rp.5.967.608.713,00.

Ringkasan Laporan Operasional periode 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban	5.967.608.713,00	6.137.606.102,00	(169.997.389,00)	(2,77)

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah Ekuitas pada 31 Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.844.404.473,07 yang terdiri dari selisih antara Ekuitas Awal sebesar Rp. 2.952.617.805,41 dan Defisit-LO sebesar (Rp. 5.967.608.713,00), Koreksi Ekuitas sebesar Rp. 0,66 dan Kewajiban Untuk di Konsolidasikan adalah sebesar Rp.5.895.395.380,00.

(dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	2.952.617.805,41	3.435.088.316,41
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.967.608.713,00)	(6.137.606.102,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,66	(4.867.090,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.859.395.380,00	5.660.002.681,00
EKUITAS AKHIR	2.844.404.473,07	2.952.617.805,41

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan

sebelumnya.

Jumlah Persediaan adalah sebesar Rp. 19.538.690,00 dan jumlah Aset adalah sebesar Rp. 2.844.404.473,07 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 0,00 , Aset Tetap sebesar Rp. 2.735.006.668,07 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 89.859.115,00. Sementara itu jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp.2.844.404.473,07.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset		
- Aset lancar	19.538.690,00	0,00
- Aset tetap	2.735.006.668,07	2.849.403.222,07
- Aset Lainnya	89.859.115,00	103.214.583,34
Jumlah Aset	2.844.404.473,07	2.952.617.805,41
Kewajiban		
-Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
-Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Ekuitas		
- Ekuitas	2.844.404.473,07	2.952.617.805,41
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	2.844.404.473,07	2.952.617.805,41

5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi uang yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk di ungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
PER 31 DESEMBER 2021				
URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			(Rp)	(%)
BELANJA DAERAH	6.940.990.529,00	5.847.945.380,00	1.093.045.149,00	84,25
BELANJA OPERASI	6.571.185.129,00	5.480.449.680,00	1.090.735.449,00	83,40
Belanja Pegawai	3.592.506.569,00	2.707.932.704,00	884.573.865,00	75,38
Belanja Barang dan Jasa	2.978.678.560,00	2.772.516.976,00	206.161.584,00	93,08
BELANJA MODAL	369.805.400,00	367.495.700,00	2.309.700,00	99,38
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.336.400,00	242.838.200,00	498.200,00	99,80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	126.469.000,00	124.657.500,00	1.811.500,00	98,57
SURPLUS / (DEFISIT)	(6.940.990.529,00)	(5.847.945.380,00)	(1.093.045.149,00)	84,25
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.940.990.529,00)	(5.847.945.380,00)	(1.093.045.149,00)	84,25

LAPORAN OPERASIONAL (LO)				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
PER 31 DESEMBER 2021				
URAIAN	SALDO		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	TAHUN 2021	TAHUN 2020	(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	5.967.608.713,00	6.137.606.102,00	(170.181.853,00)	(2,77)
Beban Pegawai	2.707.932.704,00	4.328.947.417,00	(1.621.014.713,00)	(37,45)
Beban Barang dan Jasa	2.772.516.967,00	1.291.273.445,00	1.492.693.531,00	114,71
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	253.000,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	390.072.170,00	423.784.346,00	(46.171.296,00)	(7,96)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.263.394,00	24.263.394,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.487.500,00	7.487.500,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	65.082.969,00	61.850.000,00	4.310.625,00	5,23
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(5.967.424.249,00)	(6.137.606.102,00)	170.181.853,00	(2,77)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
PER 31 DESEMBER 2021			
U R A I A N	JUMLAH (Rp)		Keterangan
	2021	2020	
EKUITAS AWAL	2.952.617.805,41	3.435.088.316,41	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.967.608.713,00)	(6.137.606.102,00)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: - Koreksi Ekuitas	0,66 (4.867.090,00)	(4.867.090,00)	
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.859.395.380,00	5.660.002.681,00	
EKUITAS AKHIR	2.844.404.473,07	2.952.617.805,41	

NERACA				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
PER 31 DESEMBER 2021				
URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	(%)
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0
Persediaan	19.538.690,00	0,00	19.538.690,00	0
JUMLAH ASET LANCAR	19.538.690,00	0,00	19.538.690,00	100,00
ASET TETAP				
Tanah	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.687.800.775,24	2.380.374.265,24	307.426.510,00	11,44
Gedung dan Bangunan	1.213.169.669,07	1.213.169.669,07	0,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	299.500.000,00	299.500.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	394.092.239,00	394.092.239,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.434.980,00	6.434.980,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.947.990.995,24)	(1.526.167.931,24)	(421.823.064,00)	21,65
JUMLAH ASET TETAP	2.735.006.668,07	2.849.403.222,07	(114.396.554,00)	(4,18)
ASET LAINNYA			0,00	0,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	314.127.500,00	262.400.000,00	51.727.500,00	16,47
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(224.268.385,00)	(159.185.416,66)	(665.082.968,34)	29,02
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	89.859.115,00	103.214.583,34	(13.355.468,34)	(14,86)
JUMLAH ASET	2.844.404.473,07	2.952.617.805,41	(108.213.332,34)	(3,80)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS				
EKUITAS	2.952.617.805,41	2.952.617.805,41	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.844.404.473,07	2.952.617.805,41	(108.213.332,34)	(3,80)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non-keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca .

Informasi yang disajikan dalam keempat laporan tersebut secara bersama-sama disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 31 Desember 2021 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

- Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

I.3. SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- 2.1. Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.2 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.2.1 Pendapatan-LO
 - 5.2.2 Beban
- 5.3 Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.3.1 Ekuitas Awal

- 5.3.2 Surplus/Defisit – LO
- 5.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya
- 5.3.4 Kewajiban Untuk di Konsolidasikan
- 5.3.5 Ekuitas Akhir
- 5.4 Penjelasan Akun-akun Neraca
 - 5.4.1 Aset Lancar
 - 5.4.2 Aset Tetap
 - 5.4.3 Aset Lainnya
 - 5.4.4 Aset Extracomptable
 - 5.4.5 Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
BABVII PENUTUP

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.6.940.990.529,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.6.571.185.129,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.369.805.400,00.

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp.5.859.395.380,00 yang terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.5.491.889.680,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.367.495.700,00.

Selanjutnya disajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan per 31 Desember tahun 2021.

Rincian Pencapaian Target Kinerja APBD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2021
Per Program dan Kegiatan :

KODE	URAIAN	PAGU DANA (Rp)	BOBOT (%)	REAL KEUANGAN		REAL FISIK (%)		KET
				Rp.	%	FISIK	TTB	
1	2	5	6	7	8	11	12	13
2.06 -1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,627,916,154	64.04	1,587,643,078	97.53	100.00	64.04	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	178,586,000	10.97	178,511,964	99.96	100.00	10.97	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35,000,000	2.15	13,801,000	39.43	100.00	2.15	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,122,830,154	68.97	1,114,731,042	99.28	100.00	68.97	
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10,000,000	0.61	10,000,000	100.00	100.00	0.61	
10	Penyediaan alat tulis kantor	25,000,000	1.54	24,986,000	99.94	100.00	1.54	
11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	15,000,000	0.92	15,000,000	100.00	100.00	0.92	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,500,000	0.40	6,500,000	100.00	100.00	0.40	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	0.61	9,960,000	99.60	100.00	0.61	
17	Penyediaan makanan dan minuman	25,000,000	1.54	16,475,000	65.90	100.00	1.54	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,000,000	6.14	98,249,372	98.25	100.00	6.14	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100,000,000	6.14	99,428,700	99.43	100.00	6.14	
2.06 -2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45,000,000	1.77	45,000,000	100.00	100.00	1.77	
82	Penataan halaman perkantoran	45,000,000	100.00	45,000,000	100.00	100.00	100.00	
2.06-5	Program Peningkatan Kapasitas	10,000,000	0.39	8,440,000	84.40	100.00	0.39	

	Sumber Daya Aparatur							
1	Pendidikan dan pelatihan formal	10,000,000	100.00	8,440,000	84.40	100.00	100.00	
2.06-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	133,271,000	5.24	125,119,500	93.88	100.00	5.24	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42,000,000	31.51	35,499,400	84.52	100.00	31.51	
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	15,000,000	11.26	15,000,000	100.00	100.00	11.26	
6	Penyusunan RKA-SKPD	56,271,000	42.22	56,221,000	99.91	100.00	42.22	
60	Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Aset	20,000,000	15.01	18,399,100	92.00	100.00	15.01	
2.06-15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	435,000,000	17.11	420,750,585	96.72	100.00	17.11	
34	Pelaksanaan Distribusi Blangko KTP Elektronik	200,000,000	45.98	188,438,088	94.22	100.00	45.98	
36	Penyajian Data Akta Pencatatan Sipil	75,000,000	17.24	73,321,434	97.76	100.00	17.24	
41	Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	75,000,000	17.24	74,121,063	98.83	100.00	17.24	
45	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	85,000,000	19.54	84,870,000	99.85	100.00	19.54	
2.06-16	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250,000,000	9.83	244,375,448	97.75	100.00	9.83	
16	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Edukasi Terhadap Administrasi Kependudukan	80,000,000	32.00	76,477,260	95.60	100.00	32.00	
23	Anjungan Media Centre Kependudukan	20,000,000	8.00	20,000,000	100.00	100.00	8.00	
30	Bimtek Pemanfaatan Data Kependudukan	50,000,000	20.00	49,360,100	98.72	100.00	20.00	
32	Pemanfaatan Jaringan Data Administrasi Kependudukan	100,000,000	40.00	98,538,088	98.54	100.00	40.00	
2.06-17	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	40,867,000	1.61	40,783,876	99.80	100.00	1.61	
5	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	40,867,000	100.00	40,783,876	99.80	100.00	100.00	
	JUMLAH	2,542,054,154	100	2,472,112,487	97.25	100.00		

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp.5.859.395.380,00 atau 84,42% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp.6.940.990.529,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan ikhtisar sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
BELANJA DAERAH	6.940.990.529,00	5.847.945.380,00	84,25
BELANJA OPERASI	6.571.185.129,00	5.480.449.680,00	83,40
Belanja Pegawai	3.592.506.569,00	2.707.932.704,00	75,38
Belanja Barang dan Jasa	2.978.678.560,00	2.772.516.976,00	93,08
BELANJA MODAL	369.805.400,00	367.495.700,00	99,38
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.336.400,00	242.838.200,00	99,80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	126.469.000,00	124.657.500,00	98,57
SURPLUS / (DEFISIT)	(6.940.990.529,00)	(5.847.945.380,00)	84,25
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.940.990.529,00)	(5.847.945.380,00)	84,25

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat hambatan dan kendala yaitu adanya rasionalisasi anggaran dan pengurangan kegiatan disebabkan adanya defisit anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengakibatkan sejumlah pelaksanaan program dan kegiatan tidak sepenuhnya berjalan sesuai perencanaan. Dan juga adanya salah penganggaran pada beberapa kegiatan yang akhirnya pada akhir tahun 2021 terjadi Mutasi/Reklas.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 49 Tahun 2017 sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibuat akan dijelaskan sebagai berikut:

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basisi akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.1.1.Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau oleh entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

4.1.2.Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

4.1.3.Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

4.1.4.Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lain atau lembaga

internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.1.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.1.6. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.1.7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.1.8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka Penyusunan Neraca Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup Keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berikut disajikan uraian tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Ekuitas Akhir, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sebagai berikut:

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN REALISASI ANGGARAN(LRA)

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 karena tidak ada anggaran pendapatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

5.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.5.847.945.380,00.

Rincian Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja Pegawai	3.592.506.569,00	2.707.932.704,00	75,38
Belanja Barang dan Jasa	2.978.678.560,00	2.772.516.976,00	93,08
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.336.400,00	242.838.200,00	99,80
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	126.469.000,00	124.657.500,00	98,57
JUMLAH BELANJA	(6.940.990.529,00)	(5.847.945.380,00)	84,25

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah di anggarkan sebesar Rp.3.592.506.569,00. Sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasikan sebesar Rp.2,707.932.704,00 atau 75,38% dari yang di anggarkan.

Rincian Realisasi belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai			
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.135.946.569,00	1.534.872.704,00	71,86
Belanja Gaji Pokok ASN	1.426.460.200,00	1.208.467.200,00	84,72
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	209.431.075,00	96.136.142,00	45,90
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.872.500,00	106.620.000,00	65,46
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	86.100.000,00	27.874.950,00	32,38
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.418.250,00	29.800.000,00	38,49
Belanja Tunjangan Beras ASN	80.168.940,00	57.139.380,00	71,27
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	92.830.420,00	8.816.070,00	9,50
Belanja Pembulatan Gaji ASN	665.184,00	18.962,00	2,85
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.335.000.000,00	1.051.500.000,00	78,76
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.335.000.000,00	1.051.500.000,00	78,76
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	121.560.000,00	121.560.000,00	100,00
Belanja Honorarium	121.560.000,00	121.560.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA PEGAWAI	3.592.506.569,00	2.707.932.704,00	75,38

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dianggarkan sebesar Rp.2.978.678.560,00. Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 telah terealisasi sebesar Rp.2.772.516.976,00 atau 93,08%.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang	522.961.660,00	486.420.400,00	93,01
Belanja Barang Pakai Habis	522.961.660,00	486.420.400,00	93,01
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.842.442,00	19.643.640,00	86
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.075.000,00	2.875.000,00	56,65
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	10.010.800,00	0,00	0
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.081.160,00	12.481.160,00	88,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	64.113.850,00	61.534.000,00	95,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.855.898,00	61.244.100,00	99,01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	223.923.010,00	215.500.500,00	96,24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	9.820.000,00	9.820.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.941.500,00	7.941.500,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.990.500,00	1.990.500,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	100

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.912.000,00	67.017.500,00	89,46
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.895.500,00	3.872.500,00	99,41
Belanja Jasa	1.491.689.064,00	1.370.025.909,00	91,84
Belanja Jasa Kantor	1.480.509.064,00	1.360.525.909,00	91,9
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56.800.000,00	45.000.000,00	79,23
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53.250.000,00	50.800.000,00	95,4
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	947.820.000,00	894.489.105,00	94,37
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	200.000,00	75.000,00	37,5
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	0,00	0
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	44.850.000,00	39.750.000,00	88,63
Belanja Tagihan Listrik	92.438.640,00	91.915.822,00	99,43
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	9.660.000,00	96,6
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	230.505.000,00	204.279.982,00	88,62
Belanja Paket/Pengiriman	41.769.424,00	22.880.000,00	54,78
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.676.000,00	1.676.000,00	100
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.180.000,00	9.500.000,00	84,97
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.180.000,00	7.500.000,00	81,7
Belanja Sewa Hotel	2.000.000,00	2.000.000,00	100
Belanja Pemeliharaan	22.609.558,00	22.487.400,00	99,46
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.609.558,00	22.487.400,00	99,46
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.850.000,00	6.850.000,00	100
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.500.000,00	7.475.000,00	99,67
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	8.259.558,00	8.162.400,00	98,82
Belanja Perjalanan Dinas	941.418.278,00	893.583.267,00	94,92
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	941.418.278,00	893.583.267,00	94,92
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	941.418.278,00	893.583.267,00	94,92
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	2.978.678.560,00	2.772.516.976,00	93,08

c. Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah dianggarkan sebesar Rp.369.805.400,00. Sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp.367.495.700,00 atau 99,38%. Rincian realisasi Belanja Modal Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

Rincian realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.336.400,00	242.838.200,00	99,80
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	179.556.400,00	179.335.200,00	99,88
Belanja Modal Alat Kantor	149.556.400,00	149.415.200,00	99,91

Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	29.920.000,00	99,73
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.530.000,00	16.313.000,00	98,69
Belanja Modal Alat Studio	16.530.000,00	16.313.000,00	98,69
Belanja Modal Komputer	47.250.000,00	47.190.000,00	99,87
Belanja Modal Komputer Unit	47.250.000,00	47.190.000,00	99,87
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	126.469.000,00	124.657.500,00	98,57
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	73.730.000,00	72.930.000,00	98,91
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	73.730.000,00	72.930.000,00	98,91
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	52.739.000,00	51.727.500,00	98,08
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	52.739.000,00	51.727.500,00	98,08
JUMLAH BELANJA MODAL	369.805.400,00	367.495.700,00	99,38

5.2 Penjelasan Akun- Akun Laporan Operasional(LO)

5.2.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan - LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00.

5.2.2 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.5.967.424.249,00. Beban tersebut terdiri dari beban pegawai-LO Rp.2.707.932.704,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.2.783.966.976,00, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.475.524.569,00.

a. Beban Pegawai – LO

Jumlah Belanja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.707.932.704,00 sedangkan Beban Rp.2.707.932.704,00. Tidak adaselisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban Rincian Beban Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Gaji Pokok PNS	1.208.467.200,00	1.208.467.200,00	0,00	
Beban Tunjangan Keluarga PNS	96.136.142,00	96.136.142,00	0,00	
Beban Tunjangan Jabatan PNS	106.620.000,00	106.620.000,00	0,00	
Beban Tunjangan Fungsional PNS	27.874.950,00	27.874.950,00	0,00	
Beban Tunjangan Fungsional	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	
Beban Tunjangan Beras PNS	57.139.380,00	57.139.380,00	0,00	
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.816.070,00	8.816.070,00	0,00	
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.962,00	18.962,00	0,00	
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.051.500.000,00	1.051.500.000,00	0,00	
Beban Honorarium	121.560.000,00	121.560.000,00	0,00	
Jumlah Beban Pegawai	2.707.932.704,00	2.707.932.704,00	0,00	

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.772.516.976,00

Beban Barang dan Jasa terdiri atas :

1. Beban Bahan Pakai Habis

Beban barang pakai habis adalah beban berupa konsumsi barang pakai habis (persediaan). Bahan bahan pakai habis dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban bahan pakai habis dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah belanja barang bahan habis pakai pada awal periode per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 497.870.400,00,00 sedangkan jumlah beban belanja bahan pakai habis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 486.420.400,00. Terdapat selisih antara Belanja dan Beban Bahan Pakai Habis berupa Bahan-bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp.2.200.000,00 dan Bahan Isi Tabung Gas sebesar Rp.9.250.000,00 karena adanya Persediaan Bahan. Rincian Beban Bahan Pakai habis adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.643.640,00	19.643.640,00	0,00	
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.075.000,00	2.875.000,00	2.200.000,00	Persediaan
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	Persediaan
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.481.160,00	12.481.160,00	0,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.534.000,00	61.534.000,00	0,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.244.100,00	61.244.100,00	0,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	215.500.500,00	215.500.500,00	0,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.941.500,00	7.941.500,00	0,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.990.500,00	1.990.500,00	0,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	67.017.500,00	67.017.500,00	0,00	
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.872.500,00	3.872.500,00	0,00	
Jumlah beban bahan Pakai Habis	497.870.400,00	486.420.400,00	11.450.000,00	

2. Beban Jasa kantor

Beban jasa kantor adalah beban berupa konsumsi jasa selama periode berjalan. Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. Jumlah belanja jasa kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.360.525.909,00 sedangkan beban jasa sebesar Rp. 1.360.525.909,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah belanja dan jumlah beban yang menjadi sisa persediaan pada akhir periode anggaran Tahun 2021. Hal itu dikarenakan pada tagihan belanja listrik dan internet bulan Desember di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah telah dibayarkan pada bulan Desember, sehingga tidak menimbulkan adanya utang beban listrik dan internet pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021. Rincian Beban Jasa Kantor adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
Beban Jasa Tenaga Administrasi	894.489.105,00	894.489.105,00	0,00	
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	75.000,00	75.000,00	0,00	
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	
Beban Tagihan Listrik	91.915.822,00	91.915.822,00	0,00	
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	204.279.982,00	204.279.982,00	0,00	
Beban Paket/Pengiriman	22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00	
Jumlah Beban Jasa Kantor	1.360.525.909,00	1.360.525.909,00	0,00	

3. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban sewa gedung dan bangunan adalah berupa beban atas sewa gedung dan bangunan yg dilakukan untuk kegiatan kantor diluar kantor. Jumlah belanja sewa gedung dan bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.9.500.000,00 sedangkan beban belanja perawaran kendaraan bermotor Rp.9.500.000,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah

belanja dan jumlah beban sewa gedung dan bangunan pada akhir periode 2021. Rincian Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
Beban Sewa Hotel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
Jumlah Beban Sewa Gedung dan Bangunan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	

4. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban pemeliharaan peralatan dan mesin adalah berupa beban atas perawatan peralatan dan mesin kantor guna menunjang aktifitas kegiatan perkantoran sehari-hari. Jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 22.487.400,00 sedangkan beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.22.487.400,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah belanja dan jumlah beban pemeliharaan peralatan dan mesin pada akhir periode 2021.

Rincian Beban Cetak dan Penggandaan sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	8.162.400,00	8.162.400,00	0,00	
Jumlah Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.487.400,00	22.487.400,00	0,00	

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah beban berupa perjalanan dinas selama periode berjalan. Beban perjalanan Dinas meliputi beban perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Jumlah belanja perjalanan dinas pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.893.583.267,00 sedangkan beban perjalanan dinas sebesar Rp.893.583.267,00. Tidak terdapat selisih antara realisasi jumlah belanja dan jumlah beban yang menjadi sisa persediaan pada akhir periode 2021.

Rincian Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban Perjalanan Dinas Biasa	893.583.267,00	893.583.267,00	0,00	
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	893.583.267,00	893.583.267,00	0,00	

6. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain (disebut juga beban nonoperasional) adalah pengorbanan tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Yang termasuk dalam beban lain-lain contohnya beban bunga, rugi penjualan surat berharga, rugi penjualan aset tetap atau nilai aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitasasi aset.

Rincian Beban lain-lain sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN	BEBAN	SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN BEBAN	KET
Beban lain-lain	0,00	253.000,00	253.000,00	Reklas dari belanja modal peralatan dan mesin ke Extracompatible karena nilai nya dibawah nilai kapitasasi.
Jumlah Beban Lain-lain	0,00	253.000,00	253.000,00	

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur masa manfaatnya. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (475.524.569,00).

Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut :

URAIAN	BEBAN (Rp)	KET
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	28.033.214,00	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	28.033.214,00	
Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.080.000,00	
Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	11.631.600,00	
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.386.564,00	

Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	33.218.000,00
Beban Penyusutan Mebel	42.064.000,00
Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	540.000,00
Beban Penyusutan Alat Pembersih	1.320.000,00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	21.106.001,00
Beban Penyusutan Alat Dapur	8.063.400,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.790.285,00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	11.622.000,00
Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	1.200.000,00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	5.614.000,00
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	3.393.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	1.985.505,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	4.012.764,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	1.367.400,00
Beban Penyusutan Personal Computer	43.969.163,00
Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	46.498.749,00
Beban Penyusutan Peralatan Mini Komputer	2.296.600,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	21.706.913,00
Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya	7.091.668,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	5.361.111,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	16.875.702,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.387.692,00
Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	4.987.500,00
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	2.500.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	3.232.969,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	61.850.000,00
Jumlah Beban Amortisasi dan Penyusutan	486.219.014,00

Rekapitulasi beban barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Saldo Beban Barang dan Jasa Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2021

URAIAN	SALDO 2021(Rp.)	SALDO 2020 (Rp.)	KET.
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.643.640,00		
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.875.000,00		
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	0,00		
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.481.160,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.534.000,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.244.100,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	215.500.500,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	9.820.000,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.941.500,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.990.500,00		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.500.000,00		
Beban Makanan dan Minuman Rapat	67.017.500,00		
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.872.500,00		
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.000.000,00		
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.800.000,00		
Beban Jasa Tenaga Administrasi	894.489.105,00		
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	75.000,00		
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	39.750.000,00		
Beban Tagihan Listrik	91.915.822,00		
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.660.000,00		
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	204.279.982,00		

Beban Paket/Pengiriman	22.880.000,00		
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.676.000,00		
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00		
Beban Sewa Hotel	2.000.000,00		
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.850.000,00		
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.475.000,00		
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	8.162.400,00		
Beban Perjalanan Dinas Biasa	893.583.267,00		
Jumlah Saldo Beban Barang dan Jasa	2.772.516.976,00		

5.3 Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.3.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.2.952.617.805,41.

5.3.2 Surplus/Defisit – LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar (Rp.5.967.608.713,00). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

5.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya untuk periode 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp. 0,66). Dimana Koreksi Ekuitas lainnya merupakan koreksi nilai ekuitas, dimana hal itu merupakan penerimaan yang tidak berulang dan dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitasnya. Dan pada Tahun Anggaran 2021 ada nya koreksi ekuitas adalah karena adanya pembulatan angkat yg menyesuaikan antara nilai di Simda BMD dan Simda Keuangan.

5.3.4 Kewajiban untuk di konsolidasikan

Jumlah Kewajiban untuk dikonsolidasikan untuk periode 31 Desember 2021 adalah Rp.5.859.395.380,00. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah mutasi yang di dapat dari seluruh transaksi serta jurnal memorial yang diperlukan pada SKPD.

5.3.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 Rp.2.844.404.473,07. Nilai ekuitas akhir adalah penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit LO dan Koreksi EkuitasLainnya dengan ekuitas awal tahun.

Rincian perubahan ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Perubahan Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	2.952.617.805,41	3.435.088.316,41
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.967.608.713,00)	(6.137.606.102,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Koreksi Ekuitas	(0,66)	(4.867.090,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.859.395.380,00	5.660.002.681,00
EKUITAS AKHIR	2.844.404.473,07	2.952.617.805,41

5.4 Penjelasan Akun-akun Neraca

5.4.1 ASET LANCAR

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

b. Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.19.538.690,00. Yang merupakan persediaan barang habis pakai berupa persediaan bahan/bibit tanaman senilai Rp. 2.200.000,00 dan persediaan isi tabung gas senilai Rp. 9.250.000,00 serta persediaan alat tulis kantor senilai Rp. 8.088.690,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Persediaan	0,00	19.538.690,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.2 ASET TETAP

a. Tanah

Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 82.000.000,00 dan Rp. 82.000.000,00. Mutasi perubahan tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Per 01 Januari 2021 (a)	Rp.	82,000,000.00

Penambahan : (b)		
-Pembelian		
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		
-Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	0,00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		39,781,819.00
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp.	82,000,000.00

Dengan demikian, rincian Saldo akhir tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI(Rp.)
Tanah	82.000.000,00
Jumlah	82,000,000.00

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 2.380.374.265,24 dan Rp. 2.687.800.775,24.

Mutasi perubahan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2021 (a)	Rp.	2.380.374.265,24
Penambahan : (b)		
-Pembelian		242.838.200,00
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		72.930.000,00
-Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	315.768.200,00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		8.088.690,00
-Reklasifikasi Keluar		253.000,00
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		

Jumlah (c)	Rp.	8.341.690,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	307.426.510,00
Saldo Per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp.	2.687.800.775,24

- Penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 315.768.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembelian yang berasal dari belanja modal alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp. 44.000.000,00.
 - Pembelian yang berasal dari belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp. 12.946.820,00
 - Pembelian yang berasal dari belanja modal komputer sebesar senilai Rp. 185.891.380,00
- Pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 8.341.690,00 dengan Rincian sebagai berikut :
 - Transfer Keluar dari belanja modal peralatan komputer ke persediaan karena merupakan barang habis pakai sebesar Rp. 8.088.690,00
 - Reklas/mutasi kurang dari belanja modal peralatan dan mesin ke extracomptable karena nilainya dibawah nilai kapitasasi aset yaitu sebesar Rp. 253.000,00

Dengan demikian, rincian saldo akhir peralatan dan mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Electric Generating Set	96.250.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	392.465.000,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.600.000,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	25.400.000,00
Alat Reproduksi (Penggandaan)	58.158.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	109.850.907,75
Alat Kantor Lainnya	(416.421.298,00)
Mebel	201.670.000,00
Alat Pengukur Waktu	2.700.000,00
Alat Pembersih	1.335.000,00
Alat Pendingin	164.362.466,01
Alat Dapur	9.280.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	196.070.432,00
Meja Kerja Pejabat	215.803.083,02
Meja Rapat Pejabat	11.120.000,00
Kursi Kerja Pejabat	61.329.346,46
Kursi Rapat Pejabat	18.000.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	69.465.000,00
Peralatan Studio Audio	3.223.000,00
Peralatan Studio Gambar	59.517.028,00
Alat Studio Lainnya	(17.823.500,00)
Alat Komunikasi Telephone	6.837.000,00
Alat Keamanan	31.275.000,00
Personal Computer	451.921.310,00

Peralatan Mini Computer	61.986.000,00
Peralatan Personal Computer	45.218.000,00
Peralatan Jaringan	143.600.000,00
Peralatan Komputer Lainnya	659.609.000,00
Peralatan Olahraga Lainnya	19.000.000,00
Jumlah	2.687.800.775,24

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 1.213.169.669,07 dan Rp. 1.213.169.669,07.

Mutasi perubahan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2021 (a)	Rp.	1,213,169,669.07
Penambahan : (b)		
-Pembelian		
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		
-Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	0.00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0.00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	0.00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp.	1,213,169,669.07

Tidak ada penambahan atau pengurangan pada akhir masa Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian, rincian saldo akhir Gedung dan Bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Bangunan Gedung Kantor	331,639,669.07
Bangunan Gedung Garasi/Pool	199,500,000.00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	682,030,000.00
Jumlah	1,213,169,669.07

d. Jalan, Irigasi dan Instalansi

Jalan, Irigasi dan Instalansi yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 299.500.000,00 dan Rp. 299.500.000,00.

Mutasi perubahan irigasi dan Instalansi adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2021 (a)	Rp.	299.500.000,00
Penambahan : (b) -Pembelian -Transfer Masuk -Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52)) -Pengembangan -Reklasifikasi Masuk -Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	0,00
Pengurangan : (c) -Transfer Keluar -Reklasifikasi Keluar -Penghapusan -Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp.	299.500.000,00

Tidak ada penambahan atau pengurangan pada akhir masa Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian, rincian saldo akhir Irigasi dan Instalansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Bangunan Pembuangan Air Kotor	199,500,000.00
Jaringan Transmisi	100,000,000.00
Jumlah	299,500,000.00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 394.092.239,00 dan Rp. 394.092.239,00 .

Mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2021 (a)	Rp.	394.092.239,00
Penambahan : (b) -Pembelian -Transfer Masuk		124.657.500,00

-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		
-Peralihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	124.657.500,00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		124.657.500,00
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	124.657.500,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp.	394.092.239,00

- Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp. 124.657.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembelian dari belanja modal aset tetap lainnya yaitu barang bercorak/kebudayaan/olahraga senilai Rp. 124.657.500,00.
- Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp. 124.657.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Reklas dari belanja modal aset tetap lainnya ke aset tetap tak berwujud senilai Rp. 51.727.500,00
 - Reklas dari belanja modal aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin-alat rumah tangga senilai Rp. 72/930.000,00

Dengan demikian, rincian saldo akhir aset tetap lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	16.000.000,00
Audio Visual	72.930.000,00
Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	(19.000.000,00)
Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	3.000.000,00
Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	(72.930.000,00)
Aset Tetap Dalam Renovasi	394.092.239,00
Jumlah	394.092.239,00

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dala, pengerjaan yang dimiliki per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 6.434.980,00.

Mutasi kontruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Per 01 Januari 2021 (a)	Rp.	6.434.980,00
---	------------	---------------------

Penambahan : (b)		
-Pembelian		
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		
-Peralihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	0,00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp.	6.434.980,00

Tidak ada penambahan atau pengurangan pada akhir masa Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian, rincian saldo akhir Irigasi dan Instalansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp.)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	6.434.980,00
Jumlah	6.434.980,00

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.065.765.601,24. Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

URAIAN	NILAI (Rp.)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(28.033.214,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(126.149.463,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(24.410.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(47.495.700,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(133.713.229,75)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(118.730.661,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(165.751.316,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(2.205.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(4.525.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(107.079.302,01)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(30.523.851,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(152.319.092,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja	(134.398.251,02)

Pejabat	
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(5.499.999,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(51.567.180,46)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(13.854.752,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(8.107.481,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(15.529.630,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(5.583.550,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	(23.243.748,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(393.061.040,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(11.776.600,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(87.479.073,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(143.600.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	(131.519,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	(7.091.668,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya	(19.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(38.174.378,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(16.400.897,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(7.387.692,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	(16.209.375,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi Software	(8.958.333,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	314.127.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(162.418.385,66)
	(61.849.999,34)
Jumlah	(1.858.131.880,24)

5.4.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 264.400.000,00 dan Rp. 316.127.500,00. Rincian mutasi perubahan aset lainnya adalah sebagai berikut :

Saldo Awal Per 01 Januari 2021 (a)	Rp.	264.400.000,00
Penambahan : (b)		
-Pembelian		
-Transfer Masuk		
-Koreksi Nilai (kapitalis nilai perolehan (MAK52))		
-Pengembangan		
-Reklasifikasi Masuk		51.727.500,00
-Pengalihan Masuk		
Jumlah (b)	Rp.	51.727.500,00
Pengurangan : (c)		
-Transfer Keluar		
-Reklasifikasi Keluar		
-Penghapusan		
-Koreksi Nilai		
Jumlah (c)	Rp.	0,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp.	51.727.500,00

- Penambahan aset lainnya sebesar Rp. 51.727.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Reklas/Mutasi tambah dari belanja modal aset tetap lainnya ke aset tak berwujud senilai Rp. 51.727.500,00.

5.4.4 ASET EXTRACOMPTABLE

Aset Extracomptable pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.246.150,29 dan Rp. 1.499.150,39 dimana ada penambahan nilai sebesar Rp. 253.00,00 karena adanya mutasi dari belanja modal peralatan dan mesin. Aset Extracomptable tidak dimasukkan ke dalam Neraca. Rincian Aset Extracomptable adalah sebagai berikut :

URAIAN	Nilai (Rp)
KIB B (Peralatan dan Mesin) Baik Extra Comptable	1.499.150,39
KIB C (Gedung dan Bangunan)	0,00
Jumlah	1.246.150,29

5.4.5 EKUITAS

Ekuitas

Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 2.952.617.805,41 dan Rp. 2.844.404.473,07. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah periode 31 Desember Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah Periode 31 Desember Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berbasis/dasar akrua.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2021 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 11 Februari 2022
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Tengah,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP. 19690806 198911 1 002

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Laporan Operasional dan Beban
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Triwulan IV Tahun 2021
6. Rekapitulasi SP2D Tahun 2021 Realisasi APBD dari 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 (SPJ Fungsional)
7. Buku Kas Umum 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021
8. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan Triwulan IV Tahun 2021
9. Berita Acara Inventaris Persediaan Barang Pakai Habis Triwulan IV Tahun 2021
10. Daftar Penambahan dan Pengurangan Persediaan Triwulan IV Tahun 2021
11. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Triwulan IV Tahun 2021
12. Daftar Penambahan Aset Tetap (Belanja Modal) Tahun 2021
13. Daftar Penambahan Aset Tetap (Diluar Belanja Modal) Tahun 2021
14. Laporan Rekapitulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021
15. Kartu Inventaris Barang (KIB. A,B,C,D,E, F dan L)